



PENGARUH KENAIKAN PPN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT KOTA TANGERANG

Anisa Putri Mulyana¹, Nurwati², Adi Rizfal Efriadi³

anisamulyana8@gmail.com¹, watisyam77@gmail.com², adirizfalefriadi31@gmail.com³

^{1,2,3}Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa, serta termasuk dalam pajak yang bersifat tidak langsung, artinya beban pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir. Berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 tarif PPN akan mengalami peningkatan pada 1 April 2022 sebesar 11% dari tarif sebelumnya 10%. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 0,12% pada bulan September 2024 menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat terjadi karena Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja di PHK, angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Masifnya PHK membuat pendapatan masyarakat kelas pekerja menurun hingga dampaknya akan lebih berhemat dalam mengelola keuangan dan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat di Kota Tangerang, khususnya Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan masyarakat Kota Tangerang yang berdomisili di wilayah Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 50 sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Analisis regresi linear berganda dilakukan dalam menguji hipotesis penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN secara positif berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, namun pada tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, serta kenaikan PPN dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Kata Kunci: kenaikan tarif PPN, Tingkat pendapatan, daya beli masyarakat

ABSTRACT

Value Added Tax is one of the vital sources of state revenue in the Indonesian taxation system. VAT is imposed on the sale and purchase of goods and services, and is included in indirect taxes, meaning that the burden of this tax is borne by the final consumer. Based on the Law on Harmonization of Tax Regulations 2021, the VAT rate will increase on April 1, 2022 by 11% from the previous rate of 10%. The Central Bureau of Statistics recorded deflation of 0.12%



in September 2024 to be the worst in the last five years of President Joko Widodo's administration. This can happen because the Ministry of Manpower recorded as many as 53,993 workers were laid off, this figure will continue to grow over time. The massive layoffs have decreased the income of the working class community, so that the impact will be more frugal in managing finances and only spending money on priority needs. This study aims to examine the effect of VAT rate increase and income level on people's purchasing power in Tangerang City, especially Karawaci and Cibodas Subdistricts using descriptive method with quantitative approach. This study uses primary data by distributing questionnaires to respondents who are residents of Tangerang City who live in the Karawaci Subdistrict and Cibodas Subdistrict areas. The research sample was determined using purposive sampling method with a total of 50 samples that met the predetermined criteria. Multiple linear regression analysis was conducted in testing the research hypothesis. The results of this study indicate that the increase in VAT positively affects people's purchasing power, but the income level has no effect on people's purchasing power, and the increase in VAT and income level simultaneously affect people's purchasing power.

Keywords: VAT rate increase, income level, purchasing power of the people

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pemasukan vital negara ialah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 tarif PPN akan mengalami peningkatan pada 1 April 2022 senilai 11% dari tarif sebelumnya 10%. Penyesuaian tarif ini kerap dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara atau untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi global. Tingkat pendapatan merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi jual-beli masyarakat, kepiawaian guna pembelian barang dan jasa dapat meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan yang mereka terima. Namun, daya beli masyarakat terutama kalangan rendah dan menengah, dapat dipengaruhi oleh perubahan harga yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN.

Deflasi ialah suatu kondisi apabila harga barang dan jasa umumnya jatuh selama periode waktu tertentu. BPS melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, tercatat sebagai titik paling rendah dalam rentang waktu lima tahun terakhir di mana pemerintahan masa Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya orang di PHK, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan ada 53.993 tenaga kerja. Masifnya PHK membuat pendapatan masyarakat kelas pekerja menurun hingga dampaknya akan lebih berhemat dalam mengelola keuangan dan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan prioritas. Pajak Pertambahan Nilai, sebagai salah satu komponen biaya tambahan dalam transaksi dapat mengurangi daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan karena PPN ini dipungut dari konsumen dan harus disetorkan dan wajib dilaporkan oleh PKP. Pernyataan ini sejalan dengan pendapatan Direktur CELIOS (*Center Of Economic and Law Studies*) yang berpendapat bahwa karena penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan secara adil, hanya didasarkan pada kewajiban pajak tanpa memperhatikan status sosial ekonomi atau tingkat pendapatan wajib pajak. Akibatnya, peningkatan tarif pada barang atau jasa yang dijual oleh pedagang akan mempengaruhi pada penetapan harga jual serta tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah hingga kelas bawah.

Studi yang dilaksanakan Larasati & Wibowo (2022) menyatakan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% secara signifikan mempengaruhi penambahan harga jual barang dan jasa

oleh tiga Pengusaha Kena Pajak yang berlokasi di Surabaya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Odi & Budiantara (2024) menunjukkan bahwa tarif PPN yang naik berdampak pada naiknya harga jual baik barang maupun jasa, kemampuan untuk mengeluarkan uang secara bebas dapat meningkat jika pendapatan yang diterima tinggi, namun berlaku sebaliknya untuk orang dengan tingkat pendapatan yang cenderung rendah. Akibatnya, harga barang dan jasa cenderung naik seiring dengan kenaikan tarif PPN, masyarakat atau konsumen dapat mengurangi frekuensi konsumsi mereka atau beralih ke barang dan jasa yang lebih murah imbas dari kenaikan harga. Sebaliknya, peningkatan pendapatan dapat mengimbangi efek negatif dari PPN sehingga membuat masyarakat tetap memiliki daya beli.

Dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi masyarakat dalam jangka panjang juga penting untuk dipertimbangkan. Hal ini dapat mengubah struktur permintaan di pasar dan mempengaruhi industri tertentu akibat para konsumen mengubah cara mereka berbelanja, seperti membeli barang yang lebih murah atau mengurangi pembelian pada barang-barang yang tidak terlalu penting. Kenaikan tarif ini memiliki dampak positif antara lain meningkatnya modal asing yang ditanamkan di Indonesia, serta meningkatnya tabungan nasional. Namun, efek dari kenaikan tarif ini dominan negatif, yaitu meningkatnya harga kebutuhan (mencakup barang dan jasa), diikuti melemahnya kemampuan konsumsi masyarakat yang kemudian sebagai pemicu inflasi. Oleh sebab itu, kebijakan untuk menaikkan tarif PPN ini tidak secara menyeluruh mampu meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dimana teori ini berawal dari *Theory Reasoned Action (TRA)* pengembangan oleh Icek Ajzen. Menurut Sustiyo (2022) teori ini merupakan kerangka berpikir untuk mengetahui alasan seseorang dalam menjalankan sesuatu Ajzen (2005). TPB menjelaskan bahwa pembentukan niat yang kuat dapat mempengaruhi cara seseorang memenuhi tujuan tertentu. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)* ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu : *Attitude toward the behavior* atau sikap terhadap perilaku, *Subjective norm* atau norma subjektif, dan *Perceived behavioral control* atau kontrol perilaku. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk membentuk niat perilaku yang merupakan tolak ukur utama apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan tertentu atau tidak. Semakin kuat sikap dan norma subjektifnya maka semakin tinggi kontrol perilaku atas tindakan yang akan mereka lakukan.

Kenaikan Tarif PPN

Salah satu kebijakan fiskal digunakan pemerintah atas sumber pendapatan negara ialah PPN. Kebijakan tersebut berdampak pada semua sektor bisnis, termasuk pada pendapatan negara, pemerintah terus menerus melakukan perubahan saat membuat kebijakan pajak. Perubahan ini sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi, dan politik, dimana masyarakat untuk bekerja sama untuk membangun negara melalui sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan bersama (Odi & Budiantara, 2024). Karena tarif pajak di Indonesia secara umum digunakan untuk menghitung pajak terutang, prinsip keadilan menentukan tarif pajak (Ervana, 2019). Namun, penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan karena penetapan tarif pajak yang salah dapat menyebabkan masalah lain. Secara umum tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terutang, tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan karena penetapan tarif pajak yang salah dapat menyebabkan masalah lain. Makin besar DPP, maka akan diikuti kenaikan sebanding pajak yang terutang (Resmi, 2019).

Tarif PPN termasuk dalam tarif proporsional, rencana kenaikan tarif ini akan menghasilkan kenaikan pendapatan negara antara Rp 350-375 triliun, kata Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI. Namun dengan ketidakpastian ekonomi global, hal ini diperkirakan akan mengakibatkan Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional senilai 0,12%, penurunan konsumsi masyarakat senilai 3,2%, serta pengurangan upah minimum (Lisnawati, 2024). Selain itu isu kenaikan tarif PPN ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Benny Soetrisno, Ketua Umum GPEI, mengatakan kenaikan tarif PPN berpotensi menambah beban pengelolaan modal kerja yang mana hal tersebut memengaruhi daya beli barang yang dijual di dalam negeri (Lisnawati, 2024). Selain itu isu kenaikan tarif PPN ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menurut Benny Soetrisno, Dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP Bab VI menyatakan bahwa tarif PPN senilai 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan tarif 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Namun kebijakan kenaikan tarif PPN 12% hanya berlaku pada pembelian barang mewah, kebutuhan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan tarif. Sehingga tarif yang digunakan tetap sebesar 11%, tarif ini akan menjadi dasar dalam perhitungan PPN terutang yang dilakukan dengan cara mengalikan harga dasar barang atau jasa dengan tarif yang telah ditetapkan. Sehingga tarif yang digunakan tetap sebesar 11%, tarif ini akan menjadi dasar dalam perhitungan PPN terutang yang dilakukan dengan cara mengalikan harga BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) dengan tarif tersebut. Kenaikan tarif PPN ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi se-ASEAN.

Pendapatan

Pendapatan nasional, kesempatan kerja, tingkat harga komoditas, neraca pembayaran, dan pendapatan per kapita merupakan faktor – faktor yang menentukan perkembangan ekonomi suatu negara (Silvia et al., 2021). Faktor – faktor tersebut dapat menunjukkan sikap positif, yang berarti presentase pertumbuhan suatu negara akan meningkat, dan sebaliknya, sikap negatif akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Odi & Budiantara, 2024). Tingkat pendapatan yang tinggi dapat menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang dapat mereka beli. Suparmoko (2002) menyatakan yaitu jenis pekerjaan seseorang, apakah buruh, pegawai, pengusaha, tukang, atau yang lainnya sangat berhubungan dengan pendapatannya. Keynes (1936) menjelaskan korelasi antara pendapatan saat ini (disposable income) dengan tingkat konsumsi saat ini, yang didasarkan pada hukum dasar psikologis konsumsi, yaitu jika pendapatan meningkat, konsumsi juga akan meningkat tetapi pada tingkat yang lebih kecil (Odi & Budiantara, 2024). Salah satu yang mempengaruhi tingkat pendapatan adalah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), merupakan jumlah terendah yang secara hukum diperbolehkan untuk dibayar oleh seseorang untuk pekerjaannya di daerah tersebut (Argyanti et al., 2024). Upah minimum 2024 mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2024, kenaikan UMK di Kota Tangerang sebesar Rp 175.770,46, artinya masyarakat di Kota Tangerang minimal penghasilannya sebesar Rp 4.760.289,54. Hal ini dapat berdampak pada tingkat pengangguran akibat para pengusaha memberhentikan para karyawan karena biaya gaji yang mereka keluarkan meningkat, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam memilih pekerja yang memenuhi persyaratan.

Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat dimaknai sebagai potensi masyarakat guna memenuhi kebutuhan dengan melakukan pembelian atas barang dan jasa. Semakin bertambahnya kebutuhan sehari-hari yang meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat sebagai akibatnya (Odi &

Budiantara, 2024). Daya beli dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu tingkat konsumsi, harga, dan pendapatan. Masyarakat akan membeli barang dengan harga lebih murah dan dalam jumlah yang lebih rendah ketika mereka memiliki daya beli yang sedikit atau pendapatan yang relative kecil, dan sebaliknya (Silvia et al., 2021). Keadaan ini terjadi agar ekonomi tertentu dapat memenuhi semua kebutuhannya, terutama kebutuhan primer. PDRB menjadi salah satu faktor naik turunnya daya beli masyarakat. Mengutip dari situs BPS Kota Tangerang, PDRB bergerak naik dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, daya beli masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan nilai lebih yang didapatkan oleh total unit usaha, baik jasa atau barang.

METODELOGI PENELITIAN

Berfokus pada fenomena dan dianalisis secara kuantitatif. Fenomena tersebut dipahami dari sudut pandang responden orang yang diobservasi atau diwawancarai (Siyoto & Soduk, 2015). Tujuannya guna menyelidiki konektivitas kausalitas antar kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan atas daya beli masyarakat. Variabel penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala ordinal menggunakan pendekatan skala Likert. Berdasarkan skala 1 sampai 5 pernyataan positif (*favorable*), dan pernyataan negatif (*unfavorable*) diberi skala 5 sampai 1. Penelitian ini menggunakan sampel nonprobability karena tidak mungkin untuk menganalisis seluruh populasi yang besar. Analisa deskriptif dilaksanakan guna menggolongkan variabel atas dasar data yang dikumpulkan, tujuannya adalah mempermudah interpretasi informasi yang dibutuhkan oleh individu tertentu tentang kondisi variabel tersebut (Al Islami, 2023). Statistika deskriptif dilaksanakan guna memaparkan karakteristik responden dari setiap variabel, yaitu kenaikan tarif PPN, tingkat pendapatan, dan daya beli.

Dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner kepada para masyarakat yang berada di Kota Tangerang khususnya wilayah Perum 1 dan Perum 2 yang termasuk dalam Kecamatan Karawaci, serta Perum 3 dan Perum 4 di Kecamatan Cibodas. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, Karawaci merupakan kawasan berkembang dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan perumahan kelas menengah ke atas, sedangkan Cibodas didominasi oleh kawasan industri dan pemukiman kelas menengah kebawah. Dampak kenaikan tarif dapat berpengaruh terhadap harga barang dan jasa di kedua wilayah tersebut. Jika harga naik maka daya beli masyarakat berpotensi akan menurun. Akses terhadap pasar dan perubahan harga barang, Karawaci memiliki beberapa pusat perbelanjaan modern dan ritel besar, sedangkan Cibodas cenderung mengandalkan pasar tradisional dan toko kecil, sehingga efek yang dirasakan oleh kedua wilayah ini akan berbeda dari adanya perubahan kenaikan tarif PPN ini. Penelitian ini menggunakan berbagai metode analisis data, termasuk pengujian instrumen, pengujian hipotesis klasik, pengujian regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Melalui analisis regresi berganda, kami menetapkan bagaimana dua variabel bebas, kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan, memengaruhi variabel terikat, daya beli penduduk. Model persamaan untuk uji regresi linear berganda dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Daya Beli Masyarakat
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X1 = Kenaikan tarif PPN
- X2 = Tingkat pendapatan
- e = Tingkat kesalahan (*error*)

PEMBAHASAN

Kota Tangerang, khususnya di Kecamatan Karawaci dan Cibodas, dipilih sebagai tempat dalam penelitian, serta bertujuan untuk mengkaji dampak kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Karawaci dan Cibodas di Kota Tangerang. Subjek dan sampel yang diuji penduduk di wilayah dengan tingkat pendapatan yang berbeda.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat secara parsial dan simultan. Tujuan dari uji hipotesis ini juga untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen terhadap variabel independen.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.187	.604		3.624	.001		
	Kenaikan Tarif PPN	.608	.150	.541	4.055	.000	.924	1.083
	Tingkat Pendapatan	-.064	.110	-.078	-.583	.563	.924	1.083

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Gambar 1. Hasil uji regresi linear berganda

Berdasarkan gambar 1 diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,187 + 0,608 X_1 - 0,064 X_2 + e$$

Nilai konstanta (α) adalah nilai positif 1,863. Ini menggambarkan adanya pengaruh satu arah antara variabel bebas dan variabel terikat. Di antaranya, jika tarif PPN meningkat dan nilai variabel tingkat pendapatan adalah 0% atau tidak berubah, nilai daya beli penduduk adalah 1,863. Koefisien regresi kenaikan tarif PPN sebesar 0,657 merupakan nilai positif yang menggambarkan adanya pengaruh searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Artinya, apabila tarif PPN mengalami kenaikan 1% dengan anggapan variabel independen lainnya tetap, maka daya beli masyarakat akan naik sebesar 0,657.

Uji statistik parsial (Uji T)

Uji-t diterapkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka hal ini mengindikasikan bahwa hanya variabel independen yang memengaruhi variabel dependen, berlaku sebaliknya. Selanjutnya jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen memengaruhi variabel dependen, namun jika nilai signifikansi > 0,05 maka berlaku sebaliknya.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.187	.604		3.624	.001		
	Kenaikan Tarif PPN	.608	.150	.541	4.055	.000	.924	1.083
	Tingkat Pendapatan	-.064	.110	-.078	-.583	.563	.924	1.083

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Gambar 2 Hasil Uji T

Gambar 2 menyajikan bahwa variabel independent yaitu kenaikan tarif PPN dengan nilai $4,055 \geq 1,30023$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, yang artinya kenaikan tarif PPN memengaruhi daya beli masyarakat secara positif. Menaikkan pajak kerap menekan daya beli masyarakat karena pajak mengurangi pendapatan riil, artinya jika tarif pajak meningkat, pendapatan aktual yang mereka terima akan berkurang karena pemotongan pajak. Akibatnya, masyarakat kurang mampu membeli barang dan jasa dibandingkan sebelum kenaikan pajak. Akibatnya, kehati-hatian masyarakat akan terdorong saat memilih barang dan jasa apa yang mereka beli. Hal ini memengaruhi jumlah PPN yang diterima pemerintah dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Odi & Budiantara, (2024) yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian oleh Larasati & Wibowo, (2022) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap kenaikan harga jual barang yang dijual pada PKP di Surabaya. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Feb & Dunci, (2023) yang menyatakan kenaikan tarif PPN tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Variabel tingkat pendapatan menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu $-0.583 \leq 1.30023$, nilai signifikansi > 0.05 . Hasil analisis uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa tidak terdapat signifikansi antara tingkat pendapatan dengan daya beli masyarakat. Artinya masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi akan cenderung menabung dibandingkan untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Hasil penelitian oleh (Feb & Dunci, 2023; Odi & Budiantara, 2024) tidak sejalan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki dampak positif pada daya beli masyarakat. Faktor utama yang memengaruhi daya beli masyarakat ialah pendapatan riil, yaitu pendapatan setelah penyesuaian perubahan harga. Jika pendapatan riil meningkat, kapasitas masyarakat dalam pembelian barang dan jasa akan meningkat. Namun, pertumbuhan pendapatan ini harus lebih tinggi atau setidaknya sebanding dengan pertumbuhan harga pasar. Jika pendapatan nominal terus menguat pada tingkat yang sama, tidak akan ditemukan peningkatan riil dalam daya beli.

Uji statistik simultan (Uji F)

Uji F dilterpakan untuk menilai signifikansi pengaruh variabel independen secara kolektif terhadap variabel dependen, Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen, sedangkan nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara kolektif tidak memengaruhi variabel dependen.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.524	2	1.762	8.376	.001 ^b
	Residual	9.256	44	.210		
	Total	12.779	46			

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Kenaikan Tarif PPN

Gambar 3 Hasil Uji F

Hasil uji f atau uji simultan menyajikan bahwa kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan saling berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dengan hasil F hitung sebesar 8,376 dan nilai signifikansi 0,001. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Feb & Dunci, 2023; Odi

& Budiantara, 2024; Silvia et al., 2021) yang menunjukkan hasil positif atau mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan memiliki keterkaitan terhadap daya beli masyarakat, kebijakan yang dibuat perlu memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan. Semakin besar pendapatan yang masyarakat terima maka semakin tinggi pula tingkat pengeluaran mereka untuk mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa. Mengingat kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat sebagai akibatnya. Masyarakat sebagai konsumen juga dapat memilih pasar tertentu untuk membeli berbagai barang atau jasa yang mereka perlukan. Situasi ini mengingatkan fakta bahwa setiap individu akan memaksimalkan kualitas hidupnya dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil pengujian data menggunakan software SPSS 26, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN memengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang atau jasa yang dijual akan meningkat, sehingga konsumen akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Hal ini dapat berefek juga pada laju perekonomian negara, daya beli masyarakat merupakan salah satu penggerak bagi jalannya roda perekonomian suatu negara. Tingkat pendapatan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, hasil penelitian ini bertentangan dengan teori karena perbedaan situasi dan kondisi wilayah yang diteliti. Berkaca pada tahun 2020 setelah pandemi, masyarakat cenderung menabung daripada konsumtif di tengah perekonomian yang tidak stabil ini. Dikutip dari BPS Kota Tangerang pendapatan masyarakat mengalami kenaikan pada 5 tahun terakhir, namun hal tersebut tidak seimbang dengan pengeluaran masyarakat yang menurun, sehingga kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan daya beli masyarakat karena kenaikan pendapatan hanya mengimbangi kenaikan harga jual barang dan jasa tanpa meningkatkan kemampuan daya beli.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan secara cermat kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat dampaknya yang signifikan terhadap penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang bersifat regresif seperti kenaikan PPN sebaiknya diimbangi dengan program kompensasi atau subsidi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, guna menjaga stabilitas konsumsi domestik yang menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, mengingat bahwa peningkatan pendapatan masyarakat dalam penelitian ini tidak serta-merta meningkatkan daya beli, pemerintah dan pelaku usaha perlu mendorong kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kenaikan nominal pendapatan, tetapi juga memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok serta mendorong kepastian ekonomi pascapandemi. Edukasi keuangan kepada masyarakat juga menjadi penting untuk menyeimbangkan antara kecenderungan menabung dan konsumsi yang sehat dalam konteks pemulihan ekonomi nasional.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kualitatif tambahan, guna menangkap dimensi sosial-ekonomi yang lebih kompleks yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, termasuk faktor psikologis, ekspektasi ekonomi, dan preferensi rumah tangga dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.

REFERENSI

- Al Islami, A. N. (2023). *Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)*. 1–196. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72250/1/Skripsi_11190820000142_Annisa Nur Al Islami %281%29.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72250/1/Skripsi_11190820000142_Annisa_Nur_Al_Islami_%281%29.pdf)
- Argyanti, A., Nurussobah, D., & Theodora, S. (2024). Prosiding Capital Market Competition | ISSN. *Prosiding Capital Market Competition*, 262–270.
- Ervana, O. N. (2019). pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55–65.
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9.
- Lisnawati. (2024). Rencana Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dan Implikasinya. *Info Singkat*, 4(Retrieved January 25, 2018 from kabar.24.bisnis.com), 14.
- Odi, S., & Budiantara, M. (2024). *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Harga Jual dan Tingkat Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat di Yogyakarta Silfester Odi 1, Martinus Budiantara 2 1,2, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia*. 14(1), 346–355. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Silvia, D., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Bharanomics*, 2(1), 81–92. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.193>
- Siyoto, S., & Soduk, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.